



REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPOLISIAN NASIONAL REPUBLIK KOLOMBIA
TENTANG KERJA SAMA DALAM PEMBERANTASAN PRODUKSI,
MANUFAKTUR, DAN PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA,
BAHAN-BAHAN PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSORNYA**

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Nasional Republik Kolombia, selanjutnya secara individual disebut sebagai "Pihak" dan secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak";

MEMAHAMI bahwa penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika, dan prekursornya merupakan masalah yang menimbulkan bahaya serius terhadap keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan nasional, dan menuntut upaya yang terintegrasi di tingkat internasional;

BERKEINGINAN untuk mengembangkan kerja sama di masa yang akan datang dengan tujuan memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya.

MENGAKUI kebutuhan untuk memperkuat dan menambahkan ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Tunggal Narkotika, diadopsi di New York pada tanggal 30 Maret 1961; Protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika, diadopsi di Jenewa pada tanggal 26 Maret 1972; Konvensi tentang Psikotropika, diadopsi di Wina pada tanggal 21 Februari 1971; dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan

Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, diadopsi di Wina pada tanggal 20 Desember 1988;

MENGAKUI pentingnya prinsip kedaulatan, kesetaraan, dan hak integritas teritorial;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Nasional Kolombia untuk menanggulangi secara efektif berbagai aspek dalam produksi, manufaktur dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursornya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup utama kerja sama antara Para Pihak dalam bidang penegakan hukum melawan peredaran gelap narkotika harus memuat, namun tidak terbatas pada ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Pertukaran informasi dan data tentang peredaran gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika, prekursornya, dan kejahatan pencucian uang terkait kejahatan narkotika, sesuai dengan peraturan perundangan nasional Para Pihak;
- 2) Pertukaran kunjungan antara pejabat dan ahli dari masing-masing Pihak, dengan tujuan untuk membahas kegiatan bersama dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika, prekursornya, dan kejahatan pencucian uang terkait kejahatan narkotika;

- 3) Pengaturan dan pelaksanaan seminar pelatihan bersama bagi personel di bidang penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya, dengan tujuan untuk mencegah kejahatan, meningkatkan kemampuan, menambah pengetahuan dan keahlian di bidang teoretis, praktis dan teknis;
- 4) Pertukaran informasi mengenai peraturan perundangan Para Pihak di bidang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan penerapannya;
- 5) Pertukaran informasi mengenai teknik-teknik baru dalam mengidentifikasi narkotika, bahan-bahan psikotropika, dan prekursornya;
- 6) Penyediaan informasi tentang jenis narkotika, bahan-bahan psikotropika, dan prekursornya, yang telah digunakan untuk membuat jenis narkotika baru yang telah atau akan diedarkan di pasar;
- 7) Pertukaran informasi mengenai program pengembangan alternatif; dan
- 8) Lingkup kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3

BENTUK KERJA SAMA LAIN

Nota Kesepahaman ini tidak akan menghambat Para Pihak dalam mengembangkan bentuk kerja sama lainnya, konsisten dengan perjanjian-perjanjian atau praktik-praktik khusus, sesuai dengan peraturan perundangan di masing-masing negara dan perjanjian internasional yang berlaku.

Pasal 4

BADAN PELAKSANA

Badan Pelaksana Nota Kesepahaman ini adalah:

1. Atas nama Badan Narkotika Nasional:

Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN;
Jl. MT. Haryono No. 11, Jakarta Timur, Indonesia
Nomor Telepon: +62-21 8087156, 80871567
E-mail: kerma@bnn.go.id

2. Atas nama Kepolisian Nasional Republik Kolombia:

Direktorat Jenderal Kepolisian Nasional Kolombia
Koordinasi dan Pengawasan: Kantor Urusan Internasional
Bogota, D.C., Carrera 59 No. 26-21 CAN, Lantai 3.
Nomor Telepon: +57 (1) 315-9133-3159675.
E-mail: dipon.asint@policia.gov.co

Pasal 5

PERLINDUNGAN INFORMASI

Para Pihak sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan informasi dan catatan yang dipertukarkan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing Pihak.

Informasi mengenai masing-masing Pihak, terkait dengan pertukaran informasi, sesuai dengan ketentuan dari Nota Kesepahaman ini tidak boleh disebarluaskan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

Pasal 6

PERTEMUAN BILATERAL

1. Dalam rangka meninjau situasi yang terkait dengan narkoba dan kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk secara bergantian mengadakan Pertemuan Bilateral berkala, baik melalui *video conference* atau di wilayah salah satu Pihak. Dalam pertemuan ini, upaya-upaya bersama yang sedang berlangsung akan ditinjau ulang dan ruang lingkup kerja sama baru akan diidentifikasi dan dikembangkan.
2. Apabila dibutuhkan, pertemuan-pertemuan khusus dapat diselenggarakan.

Pasal 7
PENGATURAN PERSONEL

1. Para Pihak melalui otoritas berwenang akan memfasilitasi kedatangan, masa tinggal dan keberangkatan personel yang terlibat secara resmi dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Personel tersebut wajib memenuhi ketentuan imigrasi, pajak, bea cukai, kesehatan, dan keamanan nasional yang berlaku di negara penerima dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan penugasan resmi.
3. Personel tersebut wajib meninggalkan negara penerima sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan nasional.
4. Para Pihak wajib memastikan personel yang terlibat dalam kegiatan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini memiliki asuransi medis dan asuransi jiwa.

Pasal 8
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Personel yang ditugaskan oleh Para Pihak untuk melaksanakan salah satu kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini wajib mengikuti petunjuk dan arahan dari lembaga tempat mereka bertugas; Dengan demikian, tidak ada hubungan antar lembaga yang akan dibentuk dengan Pihak lainnya yang bersifat substitusi atau gabungan.

Pasal 9
BIAYA DAN PENGELUARAN

Setiap Pihak harus menanggung biaya terkait dengan partisipasinya dalam kegiatan yang timbul dari kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketersediaan anggaran dan hukum nasional yang berlaku, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak berdasarkan kasus per kasus.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran dan penerapan atas Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai oleh kedua Pihak melalui konsultasi atau negosiasi, dan hasil penyelesaiannya akan dilakukan secara tertulis.

Pasal 11
KEWAJIBAN INTERNASIONAL

Nota Kesepahaman ini tidak akan menimbulkan kewajiban hukum internasional kepada Para Pihak, namun mencerminkan keinginan untuk memperkuat hubungan antara Para Pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini, sesuai dengan kompetensi kelembagaan masing-masing.

Pasal 12
AMENDEMEN

Nota Kesepahaman ini dapat diperbaiki atau diamendemen sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perbaikan atau amandemen dimaksud akan mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak serta akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan terakhir oleh Para Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama, kecuali jika salah satu Pihak berkeinginan untuk menghentikan kesepakatan tersebut dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

3. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan memengaruhi kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, dan akan dilanjutkan sampai selesaiya kegiatan dimaksud, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa berdasarkan peraturan perundangan nasional masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini.

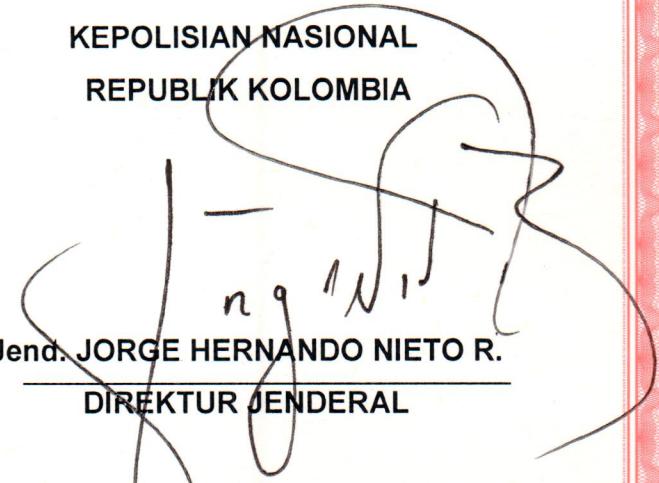
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta dan Bogota, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas Nota Kesepahaman ini, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



BUDI WASESO
KEPALA

KEPOLISIAN NASIONAL
REPUBLIK KOLOMBIA



Jend. JORGE HERNANDO NIETO R.
DIREKTUR JENDERAL

Tanggal Penandatanganan:

01/09/16

Tanggal Penandatanganan:

07-09-16



REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
ENTRE
LA JUNTA NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE LA
REPÚBLICA DE INDONESIA
Y
LA POLICÍA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONCERNIENTE A LA COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LUCHAR CONTRA LA
PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y TRÁFICO ILÍCITOS DE ESTUPEFACIENTES,
SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS Y SUS PRECURSORES

La Junta Nacional de Estupefacientes de la República de Indonesia y la Policía Nacional de la República de Colombia, referidos individualmente como "la Parte" y colectivamente como "las Partes";

ENTIENDO que el abuso de las drogas y el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sus precursores constituyen un problema que representa un grave peligro para la seguridad nacional, la salud y el bienestar de las naciones y demanda esfuerzos integrados de las Partes a nivel internacional;

INTERESADAS en continuar desarrollando la cooperación con el propósito de luchar contra el abuso de drogas y el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sus precursores;

RECONOCIENDO la necesidad de fortalecer y complementar las medidas provistas en la Convención Única sobre Estupefacientes adoptada en Nueva York el 30 de marzo de 1961; el Protocolo de Enmienda a la Convención Única sobre Estupefacientes, adoptado en Ginebra el 26 de marzo de 1972; el Convenio sobre

Sustancias Sicotrópicas adoptado en Viena el 21 de febrero de 1971, y la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, adoptada en Viena el 20 de diciembre de 1988;

RECONOCIENDO la importancia del principio de soberanía, igualdad e integridad territorial;

DE CONFORMIDAD con las leyes y normas vigentes de sus respectivos países;

HAN ALCANZADO el siguiente entendimiento:

Artículo 1 OBJETIVOS

El objetivo de este Memorando de Entendimiento es promover la cooperación entre la Junta Nacional de Estupefacientes de la República de Indonesia y la Policía Nacional de la República de Colombia para abordar de manera más efectiva varios aspectos de la producción, fabricación y tráfico ilícitos de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sus precursores.

Artículo 2 ÁREAS DE COOPERACIÓN

Las principales áreas de cooperación entre las Partes en el campo de aplicación de la ley contra drogas ilícitas incluirán, más no se limitarán a las siguientes áreas y modalidades:

- 1) Intercambio de datos e información sobre el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas, sus precursores y delitos de lavado de dinero relacionados con delitos de drogas, en conformidad con la legislación de cada una de las Partes;
- 2) Intercambio de visitas de oficiales y expertos entre las Partes, con el propósito de discutir actividades comunes en las áreas de la lucha contra el tráfico ilícito

- de estupefacientes, sustancias sicológicas, sus precursores y delitos de lavado de dinero relacionados con delitos de drogas;
- 3) Organización y ejecución de seminarios de entrenamiento mutuo para el personal comprometido en la aplicación de la ley y la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicológicas y sus precursores, con el objetivo de prevenir delitos, mejorar sus capacidades y para desarrollar conocimiento y experiencia en los campos teóricos, prácticos y técnicos.
 - 4) Intercambio de información sobre la legislación de las Partes en el área de la lucha contra el tráfico de drogas y sus aplicaciones prácticas;
 - 5) Intercambio de información relacionada con nuevas técnicas para identificar estupefacientes, sustancias sicológicas y sus precursores;
 - 6) Suministro de información sobre los tipos de estupefacientes, sustancias sicológicas y sus precursores, que hayan sido utilizados para la creación de nuevos estupefacientes químicos que sean o que puedan ser introducidos al mercado;
 - 7) Intercambio de información sobre programas de desarrollo alternativo; y
 - 8) Cualquier otra área de cooperación que sea acordada por las Partes

Artículo 3

OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN

Este Memorando de Entendimiento no impedirá a las Partes desarrollar otras formas de cooperación acordes con acuerdos específicos o prácticas, de acuerdo con sus respectivas legislaciones y los acuerdos internacionales aplicables.

Artículo 4

AGENCIAS EJECUTORAS

Las Agencias Ejecutoras de este Memorando de Entendimiento serán:

- 1. En nombre de la Junta Nacional de Estupefacientes

El Delegado para Asuntos Legales y Cooperación

JI. MT. Haryono No. 11, Jakarta Timur, Indonesia
Número Teléfonico: 62-21 8087156, 80871567
Correo electrónico: kerma@bnn.go.id

2. En nombre de la Policía Nacional de Colombia

La Dirección General de la Policía Nacional de Colombia
Coordinación y seguimiento: Oficina de Asuntos Internacionales
Bogotá, D.C., Carrera 59 No. 26-21 CAN, tercer piso.
Número telefónico: 57 (1) 315-9133 – 315-9675.
Correo electrónico: dipon.asint@policia.gov.co

Artículo 5
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las Partes se comprometen a garantizar mutuamente la estricta reserva y confidencialidad de la información y de los archivos intercambiados, sujetos de las acciones provenientes de sus respectivos sistemas legales.

La información de las respectivas Partes, en materia de intercambio de información, conforme a las disposiciones del presente Memorando de Entendimiento, no será remitida a terceras partes sin el respectivo consentimiento escrito de la otra Parte.

Artículo 6
REUNIONES BILATERALES

1. Con el fin de analizar la situación relacionada con las drogas ilícitas y sus precursores y los progresos obtenidos mediante la implementación de este Memorando de Entendimiento, las Partes acuerdan llevar a cabo periódicamente y de manera alternada reuniones bilaterales por medio de videoconferencias o en el territorio de las Partes. En estas reuniones se revisarán los esfuerzos conjuntos en curso y nuevas áreas de cooperación podrán ser identificadas y desarrolladas.

2. En caso de necesidad se podrán convocar reuniones extraordinarias.

Artículo 7

REGULACIONES PARA EL PERSONAL

1. Las Partes por intermedio de sus autoridades competentes, facilitarán la entrada, permanencia y salida del personal que participe oficialmente en las actividades que se deriven de este Memorando de Entendimiento.
2. Dicho personal deberá observar las disposiciones de inmigración, impuestos, aduanas, salud y seguridad nacional vigentes en el país receptor y no podrá realizar ninguna otra actividad que no tenga relación con sus funciones oficiales.
3. El personal saldrá del país receptor de conformidad con la legislación y disposiciones nacionales.
4. Las Partes se asegurarán que el personal que participe en las actividades que se contemplan en este Memorando de Entendimiento cuenten con pólizas de seguros médicos y de vida.

Artículo 8

RELACIONES INSTITUCIONALES

El personal asignado por las Partes para llevar a cabo cualquiera de las actividades que se establecen en este Memorando de Entendimiento, continuará bajo la dirección y dependencia de la institución a la cual pertenezca; por lo tanto, no se creará ninguna relación laboral con la otra Parte, que por ningún motivo se considerará como empleador sustituto o conjunto.

Artículo 9
COSTOS Y GASTOS

Cada Parte cubrirá los gastos relacionados con su participación en las actividades que surjan de las materias de cooperación derivadas del presente Memorando de Entendimiento, de conformidad con su disponibilidad presupuestal y lo establecido por su legislación nacional aplicable, a menos que se acuerde otra cosa por las Partes, caso por caso.

Artículo 10
RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Cualquier diferencia que surja de la interpretación y aplicación de este Memorando de Entendimiento será resuelta amistosamente por las Partes mediante consultas o negociación, y la solución se formalizará por escrito.

Artículo 11
OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Este Memorando de Entendimiento no generará obligaciones jurídicas internacionales para ninguna de las Partes, pero refleja la intención de fortalecer las relaciones entre las Partes mediante la firma de este Memorando de Entendimiento, de acuerdo con sus competencias institucionales.

Artículo 12
ENMIENDA

Este Memorando de Entendimiento podrá ser revisado o modificado en cualquier momento mediante consentimiento mutuo de las Partes. Tal revisión o modificación entrará en vigor en la fecha en que ambas Partes determinen mutuamente y formará parte integral de este Memorando de Entendimiento.

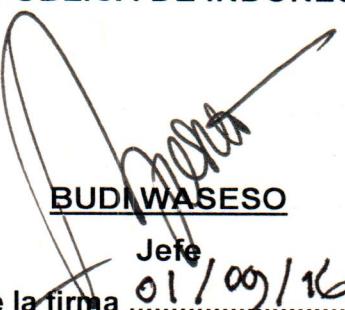
Artículo 13
ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y TERMINACIÓN

1. Este Memorando de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de la firma de la última de las partes.
2. Este Memorando de Entendimiento será válido por un periodo de cinco (5) años y será prorrogado automáticamente por el mismo periodo salvo que alguna de las Partes notifique a la otra por escrito su intención de terminar este Memorando de Entendimiento con seis (6) meses de antelación a la fecha de terminación.
3. La terminación del presente Memorando de Entendimiento no afectará el desarrollo de las actividades que se encuentren en curso, las cuales deberán continuar hasta su total conclusión, a menos que las Partes dispongan lo contrario.

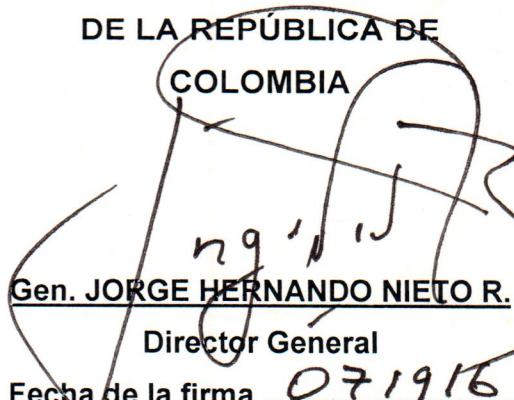
EN FÉ DE LO CUAL, los abajo firmantes estando debidamente autorizados de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales, han firmado este Memorando de Entendimiento.

ELABORADO en duplicado en Yakarta y Bogotá, en idioma español, indonesio e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de alguna divergencia en interpretación, prevalecerá el texto en idioma inglés.

**POR LA JUNTA NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES DE LA
REPÚBLICA DE INDONESIA**


BUDI WASESO
Jefe
Fecha de la firma 01/09/16

POR LA POLICÍA NACIONAL


DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA
Gen. JORGE HERNANDO NIETO R.
Director General
Fecha de la firma 07/09/16



REPUBLIC INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE NATIONAL POLICE OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA
CONCERNING TECHNICAL COOPERATION ON FIGHTING AGAINST ILLICIT
PRODUCTION, MANUFACTURING AND TRAFFICKING OF NARCOTICS,
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR PRECURSORS

The National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the National Police of Republic of Colombia hereinafter referred to individually as "the Party" and collectively referred to as "the Parties";

UNDERSTANDING that drug abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropic substances, and their precursors is a problem which constitute a serious danger to national security, health and welfare of nations, and demands integrating efforts of the Parties on international level;

INTERESTED in further cooperation development with the purpose of fighting against drug abuse and illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors;

RECOGNIZING the need to strengthen and complement the measures provided in the Single Convention on Narcotic Drugs, adopted in New York, on March 30th, 1961; the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, adopted in Geneva, on March 26th, 1972; the Convention on Psychotropic Substances, adopted in Vienna, on February 21st, 1971, and the United Nations Convention

Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, adopted in Vienna on December 20th, 1988;

RECOGNIZING the importance of the principle of sovereignty, equality and territorial integrity;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

HAVE REACHED the following understanding:

Article 1 OBJECTIVES

The objective of this Memorandum of Understanding is to promote cooperation between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the National Police of the Republic of Colombia to address more effectively various aspects of illicit production, manufacturing and trafficking in narcotics, psychotropic substances and their precursors.

Article 2 AREAS OF COOPERATION

The main areas of cooperation between the Parties in the field of law enforcement against illicit drugs shall include, but not be limited to the following areas and modalities:

- 1) Exchange of information and data on illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, their precursors and money laundering crime related to drug crimes, in accordance with the national legislation of the Parties;
- 2) Exchange of visit between officials and experts of the Parties, with the purpose to discuss common activities in the areas of fighting against illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, their precursors and money laundering crime related to drug crimes;

- 3) Organization and execution of mutual training seminars for personnel engaged in law enforcement and fighting against illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, and their precursors, with the aim to prevent crimes, improve their skills, and to develop knowledge and expertise in the theoretical, practical and technical fields;
- 4) Exchange of information about legislation of the Parties in the area of fighting against drug trafficking and their practical application;
- 5) Exchange of information concerning new techniques to identify narcotic drugs, psychotropic substances, and their precursors;
- 6) Provision of information of types of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, which have been used to create new chemical narcotics that are or may be introduced in the market;
- 7) Exchange of information on alternative development programmes; and
- 8) Any other areas of cooperation as agreed by the Parties

Article 3

OTHER FORMS OF COOPERATION

This Memorandum of Understanding shall not prevent the Parties from developing other forms of cooperation, consistent with specific agreements or practices, in accordance with its respective national legislation and the applicable international agreements.

Article 4

EXECUTING AGENCIES

The Executing Agencies for this Memorandum of Understanding shall be:

1. On behalf of the National Narcotics Board

Deputy for Legal Affairs and Cooperation;
Jl. MT. Haryono No. 11, Jakarta Timur, Indonesia
Telephone numbers: 62-21 8087156, 80871567
Email: kerma@bnn.go.id

2. On behalf of the Police of Colombia:

The Directorate General of the National Police of Colombia
Coordination and monitoring: Office of International Affairs
Bogota, D.C., Carrera 59 No. 26-21 CAN, 3rd Floor.
Telephone numbers: 57 (1) 315-9133-3159675.
E-mail: dipon.asint@policia.gov.co

Article 5
PROTECTION OF THE INFORMATION

The Parties compromises to mutually guarantee the strict reserve and confidentiality of the information and records exchanged subjecting its actions to the provisions of the respective legal system.

The information of the respective Parties, in matters of exchange of information, according to the provisions of the present Memorandum of Understanding shall not be remitted to a third party without the prior and written consent of the other Party.

Article 6
BILATERAL MEETINGS

1. In order to review the situation dealing with illicit drugs and their precursors and progress made in the implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties agree to carry out periodical Bilateral Meetings alternately either by video conference or in the territories of the Parties. In these meetings, on-going

joint efforts shall be reviewed and new areas for cooperation may be identified and developed.

2. In case of necessity, extraordinary meetings may be convened.

Article 7 **PERSONNEL REGULATIONS**

1. The Parties through their competent authorities shall facilitate the entrance, stay and departure of the personnel who is officially involved in the activities derived from this Memorandum of Understanding.
2. Such personnel shall comply with the immigration, tax, customs, health, and national security provisions in force in the receiving country and may not carry out any activity unrelated to their official duties.
3. The personnel shall leave the receiving country in accordance with the national legislation and provisions.
4. The Parties shall ensure that their personnel involved in the activities established in this Memorandum of Understanding have medical, and life insurance policies.

Article 8 **INSTITUTIONAL RELATION**

The personnel assigned by the Parties to carry out any activity established in this Memorandum of Understanding shall continue under the direction and dependence of the institution to which they pertain; therefore, no institutional relation shall be created with the other Party which in no case whatsoever shall be considered as a substitute or joint employer.

Article 9 **COST AND EXPENDITURE**

Each Party shall bear the expenditures related to its participation in the activities that arise from the matters of cooperation derived from the present Memorandum of

Understanding in accordance with its budget availability and the applicable national law, unless otherwise agreed by the parties on a case by case basis.

Article 10
SETTLEMENT OF DIFFERENCES

Any differences arising from the interpretation and implementation of this Memorandum of Understanding, shall be settled amicably by both Parties through consultation or negotiation, and the solution shall be formalized in writing.

Article 11
INTERNATIONAL OBLIGATIONS

This Memorandum of Understanding shall not generate international legal obligations for neither of the Parties, but reflects the intention to strengthen the relations between the Parties signing this Memorandum of Understanding, in accordance with their institutional competences.

Article 12
AMENDMENT

This Memorandum of Understanding may be revised or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such revision or amendment shall enter into force on the date mutually determined by both Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

Article 13
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

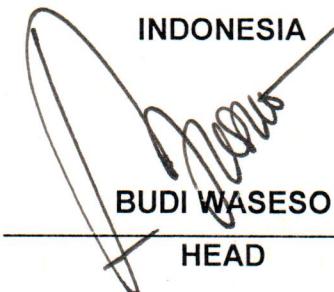
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of last signing by the Parties.
2. This Memorandum of understanding shall be valid for the period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for the same period unless either of the Parties notifies the other in writing, of its intention to terminate this

- Memorandum of Understanding 6 (six) months prior to the expiration of its termination.
3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the development of ongoing activities, which shall be continued until their total conclusion, unless otherwise agreed by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized in accordance with their respective national legislation, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE in duplicate at Jakarta and at Bogota in Indonesian, Spanish, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

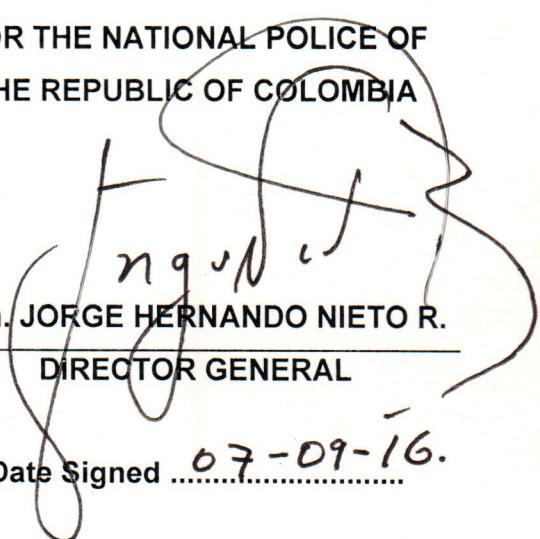
FOR THE NATIONAL NARCOTICS
BOARD OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA



BUDI WASESO
HEAD

Date Signed 01/09/16

FOR THE NATIONAL POLICE OF
THE REPUBLIC OF COLOMBIA



Gen. JORGE HERNANDO NIETO R.
DIRECTOR GENERAL

Date Signed 07-09-16.